

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajemukan (pluralitas) adalah warna dasar yang menyangga basis kultur sosial bangsa Indonesia. Realitas pluralistik masyarakat Indonesia dengan detail keunikan yang dimilikinya merupakan aset dan kekuatan memperkaya khazanah kreativitas manusia memanfaatkan alam Indonesia nan indah, subur dan makmur untuk menjadi negara besar bermartabat. Pada sisi lain, pluralitas menyimpan kerawanan pertikaian antarwarga dalam berbagai bentuk dan sumber pemicunya. Pesona pascareformasi membangunkan kesadaran warga sipil berpesta-ria mendemonstrasikan kebebasan berdemokrasi, tetapi sering berakhir dengan konflik fisik. Kemajemukan sebagai khazanah kekayaan budaya bangsa kini dihadapkan pada ancaman disintegrasi karena kecenderungan menonjolkan sentimen agama, etnis, atau keunggulan primordial lainnya.

Masyarakat Indonesia yang dikenal ramah, santun, dan religius kini dihadapkan dengan persoalan meningkatnya tindak kekerasan atas nama agama. Pada kelompok tertentu, militansi keagamaan berubah wajah dalam bentuk tindak kekerasan dan radikalisme. Masyarakat sekarang paling peka dan mudah tersulut emosinya melakukan aksi kekerasan dengan dalih mempertahankan identitas etnis, ras, agama, atau kelompoknya. Permasalahan yang kecil dari urusan pribadi dapat berubah menjadi persoalan yang melibatkan mayoritas warga desa.

Pluralitas sebagai kuasa Tuhan memberi makna imperatif kesediaan setiap individu menghormati kehadiran orang lain ikut berpartisipasi dalam menghuni bumi ini secara damai dalam rangka kompetisi untuk kreasi kebaikan. Makna beragama dalam kehidupan bersama harus dilandasi motivasi untuk saling toleransi, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda agamanya. Tumbuh kembang nilai religiusitas dan nilai toleransi secara seimbang menjadi tuntutan untuk lahirnya komunitas yang rukun damai dan dinamis.

Tidak bisa dipungkiri bumi sebagai tempat hunian umat manusia adalah satu. Namun telah menjadi *sunnatullah*, para penghuninya terdiri dari berbagai suku, ras, bahasa, profesi, kultur dan agama. Dengan demikian kemajemukan adalah fenomena yang tak bisa dihindari. Keragaman terdapat di pelbagai ruang kehidupan, termasuk dalam kehidupan beragama. Pluralitas bukan hanya terjadi dalam lingkup kelompok sosial yang besar seperti masyarakat suatu negara, tetapi juga dalam lingkup kecil seperti rumah tangga. Bisa jadi, individu-individu dalam satu rumah tangga menganut agama berbeda. Saat ini, semakin sulit mencari suatu negara yang seluruh masyarakatnya menganut agama yang seragam. Menghadapi dunia yang makin plural, yang dibutuhkan bukan bagaimana menjauhkan diri dari adanya pluralitas, melainkan bagaimana cara atau mekanisme untuk menyikapi pluralitas itu. Dalam hal ini islam mengajarkan pentingnya kerukunan dan toleransi, menolak kekerasan dan diskriminasi.

Di Indonesia ruh toleransi agama sudah diperkenalkan sebelum Indonesia sendiri ada. Ini dibuktikan dengan adanya semboyan kebhinekaan sejak zaman dahulu kala. Toleransi bukan hanya sebagai sebuah realitas sosial tapi juga

sebagai gagasan, paham-paham dan pikiran-pikiran. Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi juga menyatakan secara jelas bahwa, “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Atas undang-undang ini, semua warga negara, dengan beragam identitas kultural, suku, jenis kelamin, agama dan sebagainya, wajib dilindungi oleh negara. Ini juga berarti negara tidak boleh mendiskriminasikan warganya dengan alasan apapun. Pemerintah dan semua warga negara berkewajiban menegakkan Konstitusi tersebut.

Dalam pembangunan rumah ibadah, konstitusi Indonesia telah mengatur sedemikian rupa. Dari perizinan kepada masyarakat sampai perizinan kepada pemerintah. Tapi meski sudah diatur, tetap saja terdapat beberapa kelompok/golongan yang mencoba membangun rumah ibadah secara ilegal. Dari latar belakang ini kemudian muncul masalah anarkisme dengan nama agama.

Tragedi-tragedi ketidaktertiban suatu golongan yang berakibat anarkisme menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah. Salah satu langkah yang harus segera ditempuh adalah menyusun strategi agar Undang- Undang dan Peraturan yang telah ada untuk menjamin hak dan kewajiban pemeluk agama dapat sampai kepada masyarakat.

Ini yang menjadi latar belakang peneliti mencoba meneliti, peran nyata seperti apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah kota Salatiga apakah terkait menjaga kerukunan dan sikap toleransi umat beragama di kota Salatiga.

Salatiga dikenal sebagai miniatur Indonesia, meskipun luas wilayah hanya 56.781 km² (empat kecamatan), dengan penduduk 186.420 jiwa (<https://salatigakota.bps.go.id/statictable/2018/01/04/192/jumlah-penduduk-kota-salatiga-menurut-kecamatan-jenis-kelamin-dan-sex-ratio-2016.html>) Terletak pada jalur regional Jawa Tengah yang menghubungkan kota regional Jawa Tengah yang menghubungkan kota Semarang dan Surakarta, mempunyai ketinggian 450-800 meter dari permukaan laut dan berhawa sejuk serta dikelilingi oleh keindahan alam berupa gunung (Merbabu, Telomoyo, Gajah Mungkur). Kota Salatiga dikenal sebagai kota pendidikan, olahraga, perdagangan dan pariwisata tetapi didiami oleh beragam suku, bangsa, dan agama.

Kendati hanya terdiri dari 4 kecamatan, kota ini dihuni sekitar 30 etnis. Representasi lainnya sebagai kota paling toleran adalah keberadaan dua lembaga pendidikan berbasis agama dengan mahasiswa dari seluruh Indonesia, yakni Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Tujuan pengindeksan yang dilakukan oleh setara institute ialah untuk mempromosikan kota-kota yang dianggap berhasil membangun dan mengembangkan toleransi di wilayahnya. Hal ini diharapkan memicu kota-kota lainnya untuk mengikuti, membangun, dan mengembangkan toleransi di wilayahnya. Salatiga bersama empat kota lainnya, yaitu Manado, Pematangsiantar, Singkawang, dan Tual, mendapatkan indeks tertinggi, yakni 5.90. Sementara itu, DKI Jakarta menduduki peringkat pertama kota dengan toleransi yang rendah, disusul Banda Aceh, Bogor, Cilegon, Depok, Yogyakarta, Banjarmasin, Makassar, Padang, dan Mataram.

Kemajemukan kota Salatiga dapat menjadi persoalan krusial yang selalu mengancam persatuan dan kesatuan, karena setiap kelompok kecil kini terbuka peluang mengklaim hak-hak hidup secara layak dan diperlakukan sama tanpa diskriminatif. Semua individu berkepentingan memberikan tafsir pembenaran atas gagasan yang dikehendaki dan dipaksakan kepada kelompok lain dengan cara anarkis. Dua pemeluk agama besar (Islam dan Kristen) di kota Salatiga paling potensial menyimpan ketegangan konflik horizontal. Ketegangan yang selalu mewarnai problem Muslim di Indonesia adalah tantangan individu menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas dan pengembangan nilai toleransi dalam pergaulan masyarakat khususnya dengan non-Muslim.

Peneliti memilih Salatiga sebagai tempat penelitian karena di kota tersebut, terdapat berbagai macam agama. Baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu tersebar di seluruh penjuru Kota Salatiga dan bebas melakukan ibadah mereka dengan aman. Juga, Salatiga mempunyai slogan yang bisa dikatakan *religiuus*, yaitu, HATI BERIMAN (Sehat, Indah, Bersih, Nyaman) yang kemungkinan ke depan akan menjadi kota percontohan toleransi umat beragama di Indonesia. Rencana ini sudah dicanangkan oleh Walikota sebelumnya yaitu John Manopo, yang berencana membangun proyek besar berupa kawasan wisata religi di daerah Macanan Salatiga.

Selama ini pemerintah sudah gencar meminimalisasi konflik yang bersifat agama. Hanya saja, kadang keributan tidak bisa dihindarkan. Dengan masuknya kota Salatiga dalam daftar 10 Kota paling Toleran di Indonesia ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Salatiga untuk tetap menjaga predikat kota paling

toleran atau bahkan meningkatkan indeks kota Salatiga sebagai kota toleran, dengan tantangan banyak nya aksi terrorisme ditanah air seperti sekarang yang dapat memicu perpecahan.

Dari semua ini Pemerintah kota Salatiga melalui pengurus FKUB menjadi garda paling depan dalam menyusun agenda menjaga kerukunan dan mensosialisasikan peraturan pemerintah terkait pembangunan rumah ibadah. Dan jika kemudian konflik ini terjadi lagi, tentu FKUB menjadi organisasi yang paling bertanggung jawab terhadap konflik-konflik tersebut. Karena FKUB adalah fungsional pemerintah dalam meredakan ketegangan-ketegangan ini.

Walaupun bisa dikatakan sebagai tugas berat, tapi pemerintah kota Salagita melalui FKUB tanpa kenal lelah terus melakukan kampanye toleransi beragama, yang semua kegiatannya didanai oleh Pemerintah Kota Salatiga. Dari kegiatan bersifat intelektual seperti diskusi hingga kegiatan yang bersifat seni-budaya. Di satu sisi FKUB berupaya menjaga kerukunan umat beragama di Salatiga, di sisi lain, masih ada sekelompok orang yang terus mencoba memprovokasi perpecahan umat beragama. Ini yang menjadi pokok permasalahan peran seperti ajakah yang dilakukan dan dicanangkan pihak pemerintah kota Salatiga dalam menjaga sikap toleransi dan kerukunan umat beragama di Salatiga? Semoga dengan penelitian ini bisa memberikan masukan yang baik bagi Pemerintah Kota Salatiga sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana peran Pemerintah Kota Salatiga dalam menjaga kerukunan dan sikap toleransi umat beragama di kota Salatiga?
- b. Pihak mana saja yang berperan dan turut andil dalam praktik menjaga kerukunan dan sikap toleransi antar umat beragama di kota Salatiga?
- c. Apa saja tantangan dan hambatan Pemerintah Kota Salatiga dalam menjaga kerukunan dan sikap toleransi umati beragama di kota Salatiga?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis peran Pemerintah Kota Salatiga dalam menjaga kerukunan dan sikap toleransi umat beragama di kota Salatiga.
- b. Mendeskripsikan pihak-pihak mana saja yang turut berpartisipasi aktif serta berperan dalam menjaga kerukunan dan sikap toleransi umat beragama di kota Salatiga.
- c. Untuk Mengetahui apa sajakah tantangan dan hambatan yang dialami Pemerintah Kota Salatiga dalam menjaga, mengembangkan, dan meningkatkan kerukunan umat beragama Kota Salatiga

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis merupakan sumbangan penting dalam menambah wawasan, khususnya tentang peranan tokoh agama dan pemerintah yang dalam hal ini tergabung dalam Kementrian Agama Kota Salatiga dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mendukung toleransi antar umat beragama di

daerah-daerah lain di Indonesia untuk masa yang akan datang. Penelitian ini secara teoritis juga menambah suatu konsep yang dapat dijadikan sebagai bahan-bahann penelitian lebih lanjut khususnya mengenai Toleransi antar Umat Bergama di Kota Salatiga.

1.4.2 Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah daerah, yang dalam hal ini tergabung dalam Kementrian Agama dan Foruk Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota maupun kabupaten di seluruh Indonesia yang masih kesulitan dalam mencari langkah-langkah pengelolaan tentang keadilan hak asasi manusia dan kebebasan dan bertoleransi dalam kehidupan beragama.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dengan terjun langsung dan memberikan pengalaman yang mempermudah kemampuan dan keterampilan peneliti mulai setiap tahapan penelitian yang dilakukan dalam rangka memperoleh data di lapangan.

c. Bagi Tokoh Agama

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan tokoh agama yang ada di Kota Salatiga dalam mendukung toleransi keagamaan yang telah ada sejak lama agar memovitasi daerah-daerah lain untuk menjaga kerukunan antar umat beragama.

d. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui program maupun kegiatan keagamaan yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat berbasis keagamaan di kota Salatiga. Sehingga nantinya masyarakat dapat lebih partisipatif dalam mendukung program toleransi keagamaan yang direncanakan pemerintah dan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama menjadi lebih baik lagi.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang ditampilkan pada bagian ini bertujuan untuk membandingkan penelitian yang akan dilakukan dengan sejumlah penelitian yang pernah dilaksanakan oleh orang atau pihak lain. Hal-hal yang ditekankan pada penelitian terdahulu, meliputi konsep yang digunakan, pendekatan dan metode penelitian, hasil penelitian dan relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian terkait Sinergitas antara Pemerintah dengan Stakeholder dalam menjaga kerukunan umat beragama yaitu penelitian oleh, Titin Nuryani (2018) yang melakukan penelitian terhadap Peran FKUB Kota Salatiga, dengan judul penelitian “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam memelihara Toleransi Beragama Kota Salatiga tahun 2018 “. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan deskriptif kualitatif dimana teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan partisipasi secara langsung. Data tersebut kemudian dianalisis dengan

menggunakan triangulasi sumber data. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Salatiga sebagai salah satu kota tertoleran di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2018 karena kebiasaan masyarakat Kota Salatiga yang sejak dulu sudah kondusif dengan melakukan berbagai kegiatan lintas agama, hingga didukung dengan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Hambatan yang ditemui berupa kewaspadaan terhadap organisasi-organisasi terlarang yang menyebabkan intoleransi.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Toleransi

1. Pengertian toleransi

Toleransi secara Bahasa berasal dari Bahasa Inggris "*Tolerance*" yang berarti membiarkan. Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat atau sikap toleran, mendiamkan, membiarkan (KBBI, 1989:955). Dalam Bahasa Arab kata toleransi (mengutip kamus Al-munawir disebut dengan istilah tasamuh yang berarti sikap membiarkan atau lapang dada) Badawi mengatakan, tasamuh (toleransi) adalah pendirian atau sikap yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam meskipun tidak sependapat dengannya (Bahari, 2010:51).

Toleransi menurut istilah berarti menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang lain atau yang bertentangan dengan pendirinya sendiri. Misalnya agama, Ideologi, Ras (Poerwadarminta, 1976:829).

Sedangkan menurut Tillman, toleransi adalah saling menghargai, melalui pengertian dengan tujuan kedamaian. Toleransi adalah metode menuju kedamaian. Toleransi di sebut sebagai faktor esensi untuk perdamaian (Tillman, 2004:95) Pada intinya Toleransi berarti sifat dan sikap menghargai. Sifat dan sikap menghargai harus ditunjukkan oleh siapapun terhadap bentuk pluralitas yang ada di Indonesia. Sebab toleransi merupakan sikap yang paling sederhana, akan tetapi mempunyai dampak yang positif bagi integritas bangsa pada umumnya dan kerukunan bermasyarakat pada khususnya. Tidak adanya sikap toleransi dapat memicu konflik yang tidak diharapkan.

Pelaksanaan sikap toleransi ini harus didasari dengan sikap kelapangan dada terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dipegang sendiri, yakni tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tersebut (Daud Ali, 1989:83). Jelas bahwa toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip, dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri.

Di dalam memaknai toleransi ini terdapat dua penafsiran tentang konsep tersebut. Pertama, penafsiran negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun sama. Sedangkan yang kedua adalah penafsiran positif yaitu menyatakan bahwa toleransi tidak hanya sekedar seperti pertama (penafsiran negatif) tetapi harus adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain (Abdullah, 2001:13).

Dalam toleransi terdapat butir-butir refleksi, yaitu:

- a) Kedamaian adalah tujuan, toleransi adalah metodenya.
- b) Toleransi adalah terbuka dan reseptif pada indahnya perbedaan.
- c) Toleransi menghargai individu dan perbedaannya, menghapus topeng dan ketegangan yang disebabkan oleh ketidakpedulian. Menyediakan kesempatan untuk menemukan dan menghapus stigma yang disebabkan oleh kebangsaan, agama, dan apa yang diwariskan.
- d) Toleransi adalah saling menghargai satu sama lain melalui pengertian.
- e) Benih dari intoleransi adalah ketakutan dan ketidakpedulian.
- f) Benih dari toleransi adalah cinta, disiram dengan kasih dan pemeliharaan.
- g) Jika tidak cinta tidak ada toleransi.
- h) Yang tahu menghargai kebaikan dalam diri orang lain dan situasi memiliki toleransi.
- i) Toleransi juga berarti kemampuan menghadapi situasi sulit.
- j) Toleransi terhadap ketidaknyamanan hidup dengan membiarkan berlalu, ringan, membiarkan orang lain ringan.
- k) Melalui pengertian dan keterbukaan pikiran orang yang toleran memperlakukan orang lain secara berbeda, dan menunjukkan toleransinya. Akhirnya, hubungan yang berkembang.

Dapat disimpulkan, toleransi ialah sikap seseorang yang membiarkan dengan lapang dada, menghargai, mengakui, menghormati, tidak dendam, pengertian, terbuka terhadap pendapat, perbedaan, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, sikap dan sebagainya yang lain atau yang bertentangan dengan pendiriannya sendiri.

2. Unsur - Unsur Toleransi

Dalam toleransi terdapat unsur-unsur yang harus ditekankan dalam mengekspresikan terhadap orang lain, yaitu:

a. Memberikan Kebebasan dan Kemerdekaan

Setiap manusia diberikan kebebasan untuk berbuat, bergerak maupun berkehendak menurut dirinya sendiri sendiri dan juga di dalam memilih satu agama atau kepercayaan. Kebebasan ini diberikan sejak manusia lahir sampai nanti ia meninggal dan kebebasan atau kemerdekaan yang manusia miliki tidak dapat digantikan atau direbut oleh orang lain dengan cara apapun, karena kebebasan itu adalah datangnya dari Tuhan YME yang harus dijaga dan dilindungi. Di setiap Negara melindungi kebebasan – kebebasan setiap manusia baik dalam Undang –Undang maupun dalam peraturan yang ada (Abdullah, 2001:202).

b. Mengakui Hak Setiap Orang

Suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang di dalam menentukan sikap perilaku dan nasibnya masing- masing. Tentu saja sikap atau perilaku yang di jalankan itu tidak melanggar hak oranglain karena kalau demikian, kehidupan di dalam masyarakat akan kacau.

c. Menghormati Keyakinan Orang Lain

Dalam konteks ini, diberlakukan toleransi antar agama. Namun apabila dikaitkan dalam toleransi sosial, maka menjadi menghormati keyakinan orang lain dalam memilih kelompok. Contohnya dalam pengambilan keputusan seseorang untuk memilih organisasi pencak silat. Sebagai individu yang toleran,

seseorang harus menghormati keputusan orang lain yang berbeda dengan kelompok organisasi pencak silat kita.

d. Saling Mengerti

Tidak akan terjadi saling menghormati antara sesama manusia bila mereka tidak ada saling mengerti. Saling anti dan saling membenci, saling berebut pengaruh adalah salah satu akibat dari tidak adanya saling mengerti dan saling menghargai Antara satu dengan yang lain (Hasyim, 1979:23).

3. Toleransi di Indonesia

Toleransi di Indonesia di bahas dalam UUD 1945 BAB X tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 J (UUD 1945:14) berikut:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dengan menghormati hak asasi manusia untuk menjalankan hak dan kebebasannya berarti sudah terciptanya toleransi. Karena esensi dari toleransi adalah menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian, pendapat, pandangan kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang lain atau yang bertentangan dengan pendirinya sendiri (Poerwadarminta, 1976:829).

Pentingnya toleransi di Indonesia di katakana oleh Amir Santoso, Guru Besar FISIP UI Rektor Universitas Jayabaya bahwa konflik dalam masyarakat disebabkan oleh banyak hal dan salahsatu sebabnya adalah rendahnya toleransi antar individu dan antar kelompok. Ketika seseorang atau suatu kelompok lebih mementingkan egonya dan tidak bersedia memahami perasaan dan kepentingan pihak lain, terjadilah konflik.

1.6.2 Civil Society

Sebagaimana diketahui dari kesejarahan bangsa-bangsa yang telah maju dan demokratis, keberadaan *civil society* yang kuat merupakan salah satu landasan pokok bagi ditegakkannya sistem politik demokrasi. *Civil society* di sini didefinisikan sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dengan ciri-ciri kesukarelaan, keswadayaan, keswasembadaan dan kemandirian berhadapan dengan negara. *Civil society* menjadi penting ia dapat menjadi benteng yang menolak intervensi negara yang berlebihan melalui berbagai asosiasi, organisasi dan pengelompokan bebas di dalam rakyat serta keberadaan ruang-ruang publik yang bebas (*the free public sphare*). Melalui kelompok-kelompok mandiri itulah rakyat dapat memperkuat posisinya *vis-à-vis* negara dan melakukan transaksi-transaksi wacana sesamanya. Sedangkan melalui ruang publik bebas, rakyat sebagai warga negara yang berdaulat baik individu maupun kelompok dapat melakukan pengawasan dan kontrol terhadap negara Pers dan forum-forum diskusi bebas yang dilakukan para cendekiawan, mahasiswa, pemimpin agama, dan sebagainya ikut berfungsi sebagai pengontrol kiprah negara. *Civil society* yang didalamnya bermuatan nilai-nilai moral tertentu, akan dapat membentengi

rakyat dari gempuran sistem ekonomi pasar. Nilai-nilai itu adalah kebersamaan, kepercayaan, tanggung jawab, toleransi, kesamarataan, kemandirian dan seterusnya. Dengan masih kuatnya nilai kepercayaan dan tanggung jawab publik misalnya, maka akan dapat dikekang sikap keserakahan individual yang dicoba untuk dikembangkan oleh sistem ekonomi pasar melalui konsumerisme. Dengan diperkuatnya nilai toleransi dan kesamarataan, maka akan dapat dikontrol kehendak eksploitatif yang menjadi motor kapitalisme. Keberadaan *civil society* di dalam rakyat modern tentu tak lepas dari hadirnya komponen-komponen struktural dan kultural inheren di dalamnya. Komponen pertama termasuk terbentuknya negara yang berdaulat, berkembangnya ekonomi pasar, tersedianya ruang-ruang publik bebas, tumbuh dan berkembangnya kelas menengah, dan keberadaan organisasi-organisasi kepentingan dalam rakyat. Pada saat yang sama, *civil society* akan berkembang dan menjadi kuat apabila komponen-komponen kultural yang menjadi landasannya juga kuat. Komponen tersebut adalah pengakuan terhadap HAM dan perlindungan atasnya, khususnya hak berbicara dan berorganisasi, sikap toleran antar individu dan kelompok dalam rakyat, adanya tingkat kepercayaan publik (*publik trust*) yang tinggi terhadap pranata-pranata sosial dan politik, serta kuatnya komitmen terhadap kemandirian pribadi dan kelompok. Masyarakat madani merupakan konsep tentang masyarakat yang mampu memajukan dirinya melalui aktifitas mandiri dalam suatu ruang gerak yang tidak mungkin Negara melakukan intervensi terhadapnya. Hal ini terkait erat dengan konsep masyarakat madani dengan konsep demokrasi dan demokratisasi, karena demokrasi hanya mungkin tubuh

pada masyarakat madani dan masyarakat madani hanya berkembang pada lingkungan yang demokratis.

Dalam beberapa hal di masyarakat Indonesia terdapat embrio bagi lahir dan berkembangnya *civil society* apabila dilihat dari tradisi-tradisi lokal yang berpotensi untuk mendukung *civil society*, sayangnya tradisi-tradisi itu tidak cukup kuat dalam dirinya sendiri, sehingga kurang mempunyai daya dorong yang kuat guna melahirkan *civil society*. Tradisi-tradisi itu antara lain bisa dilihat di lembaga-lembaga pendidikan pesantren di seluruh Indonesia, Tradisi kerja sama di masyarakat Bali yang disebut subak atau di masyarakat Jawa dikenal sebagai lumbung desa, Dan lain-lain sebagainya. Menurut Aswab Mahasin, Diperlukan adanya proses identifikasi dan inventarisasi terhadap tradisi-tradisi dan warisan-warisan budaya masyarakat Indonesia yang kondusif bagi terciptanya suatu masyarakat yang modern.

Menurut Kuntowijoyo, bahwa *civil society* berwatak dinamis, dan kenyataan riil dalam sejarah, bukan masyarakat yang utopis. Ditambahkannya wacana tentang *civil society* bisa dilihat dari berbagai sudut pandang dan isme; baik itu dari kacamata agama, aliran pemikiran, mazhab filsafat ataupun praktek dan pengalaman berdemokrasi di kawasan tertentu di belahan dunia ini. Yang perlu digaris bawahi adalah bahwa semua unsur itu diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi pengembangan gagasan-gagasan dasar *civil society*. Mengenai fungsi dan peran *civil society* pun cukup beragam, yang pada intinya memperkuat posisi masyarakat bila berhadapan dengan kepentingan negara, lebih tepatnya, kepentingan penguasa. Oleh karena itu dapat dimaklumi jika Hobbes

Locke melihat *civil society* berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Adam Ferguson melihat fungsi *civil society* sebagai penjaga kohesi social dan penangkal dari ancaman negatif individualisme. Thomas Paine melihatnya sebagai antitesisi Negara, dan *civil society* di sini dapat membatasi kekuasaan Negara yang sewenang-wenang. Sedangkan Tocqueville melihat fungsi *civil society* sebagai kekuatan penyeimbang Negara.

Salah satu tujuan inti *civil society* adalah adanya usaha yang sungguh-sungguh, terencana dan sistematis untuk mewujudkan otonomi masyarakat sehingga mereka tidak bergantung kepada Negara. Dalam konteks ini, pada dasarnya, *civil society* sudah terbangun di kalangan kaum muslimin, yang bisa dilihat antara lain melalui bentuk-bentuk paguyuban yang kuat, yang mampu menciptakan solidaritas sosialnya sendiri. Dalam tataran tertentu paguyuban ini merupakan ciri utama dari kehadiran *civil society* yang baik. Hal ini dibuktikannya dengan adanya berbagai pergerakan islam yang kuat seperti Muhammadiyah, NU, SI dan lainnya.

Mengacu kepada pengertian *civil society* yang dikemukakan oleh de Tocqueville bahwa *civil society* dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan, keswasembadaan, dan keswdayaan yang mengarah pada hidup masyarakat yang mandiri dalam segala hal. Hal ini memungkinkan bila pengelompokan sosial dan politik tidak harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat pemerintah. Dengan kata lain, asosiasi-asosiasi dan berbagai perkumpulan atau organisasi dapat berkembang dengan maju dan terarah apabila didukung oleh iklim politik yang demokratis.

A. Karakteristik Masyarakat Madani (*Civil Society*)

Masyarakat madani (*civil society*) tidak muncul dengan sendirinya, namun membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan *civil society*. Unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mengikat dan menjadi karakter khas masyarakat madani. Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki dalam pembentukan *civil society* antara lain meliputi: wilayah publik yang bebas (*Free Public Sphere*), demokrasi, toleransi, kemajemukan, dan keadilan sosial

1. *Free Public Sphere*

Pada unsur pertama yaitu wilayah publik yang bebas, ruang public ini diharapkan mampu memberikan ruang pada setiap warga negara untuk dapat memiliki posisi dan hak serta kebebasan yang sama dalam mengemukakan pendapat untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan di luar *civil society*.

Sebagai sebuah prasyarat, maka untuk mengembangkan dan mewujudkan masyarakat madani dalam sebuah tatanan masyarakat, maka *free public sphere* menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan. Karena dengan menafikan adanya ruang public yang bebas dalam tatanan masyarakat madani, maka akan memungkinkan terjadinya pembungkaman kebebasan warga Negara dalam menyalurkan aspirasinya yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh penguasa yang tiranik dan otoriter.

2. Demokratis

Sedangkan demokrasi adalah prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan *civil society* yang murni. Tanpa demokrasi, *civil society* tidak mungkin terwujud. Demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani dalam menjalani kehidupan, warga Negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Demokratis berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras dan agama. Prasyarat demokratis ini banyak dikemukakan oleh para pakar yang mengkaji fenomena masyarakat madani. Bahkan demokrasi merupakan salah satu syarat mutlak bagi penegakan masyarakat madani. Penekanan demokrasi di sini dapat mencakup sebagai bentuk aspek kehidupan seperti politik, social, budaya, pendidikan, ekonomi dan sebagainya

3. Toleran

Toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi ini memungkinkan akan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda.

4. Kemajemukan

Sebagai sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani, maka plularisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan

yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu sebagai bernilai positif, merupakan rahmat Tuhan.

5. Keadilan Sosial

Pada bagian akhir dari unsur pokok *civil society* adalah adanya suatu keadilan sosial bagi seluruh warga negara, di mana terdapat suatu keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan. Dengan ini bisa dikatakan bahwa *civil society* merupakan keadaan di mana hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh sekelompok atau golongan tertentu.

Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga Negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

1.6.3 Sinergitas Aktor Kepentingan

Sinergitas aktor kepentingan bisa diartikan sebagai hubungan sinergi yang dibangun oleh para aktor kepentingan. Najiyati dalam Rahmawati et al. (2014), mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat

menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara yaitu:

a. Komunikasi

Sofyandi dan Garniwa dalam bukunya *Perilaku Organisasional* (2007) menjelaskan pengertian komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian yaitu

- (1) Komunikasi yang berorientasi pada sumber yang menyatakan bahwa komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang secara sungguh-sungguh memindahkan stimulan guna mendapatkan tanggapan. Sedangkan
- (2) Komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa, komunikasi sebagai semua kegiatan di mana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.

b. Koordinasi

Disamping adanya komunikasi dalam menciptakan sinergitas juga memerlukan koordinasi. Silalahi (2011) dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Manajemen* menjelaskan bahwa koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama". Sedangkan Moekijat dalam Rahmawati et al. (2014) menyebutkan ada 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu:

- 1) Hubungan langsung: Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung;
- 2) Kesempatan awal: Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan;

- 3) Kontinuitas Koordinasi: merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan;
- 4) Dinamisme: Koordinasi harus secara terus- menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern;
- 5) Tujuan yang jelas: Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif;
- 6) Organisasi yang sederhana: Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif;
- 7) Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas: Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan;
- 8) Komunikasi yang efektif: Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik; dan
- 9) Kepemimpinan supervisi yang efektif: Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan.

Menurut G.R. Terry (Handyaningrat 1985 : 85) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.²⁴ Sementara itu Handoko (2003:195) mendefinisikan koordinasi (coordination) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang

terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tipe-tipe Koordinasi Menurut Hasibuan (2007 :86-87) terdapat 2 (dua) tipe koordinasi, yaitu : Pertama ; Koordinasi vertical adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Kedua. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatur) yang setingkat.

1.6.4 Teori HAM

A. Teori-Teori HAM

Menurut Todung Mulya Lubis, ada empat teori HAM yang sering dibahas dalam berbagai kesempatan yang berkaitan dengan disiplin keilmuan yang didalamnya ada unsur-unsur mengenai HAM, yaitu:

1. Teori Hak-hak Alami (*Natural Rights Theory*)

HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia (*human rights are rights that belong to all human beings at all times and all places by virtue of being born as human beings*).

Teori kodrati mengenai hak (*natural rights theory*) yang menjadi asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bermula dari teori hukum kodrati (*natural rights theory*). Teori ini dapat dirunut kembali jauh ke zaman kuno dengan filsafat

Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Selanjutnya, ada Hugo de Groot (nama latinnya: Grotius), seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional”, yang mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang theistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca-Renaissans, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan 18.

Gagasan hak asasi manusia yang berbasis pada pandangan hukum kodrati itu mendapat tantangan serius pada abad ke-19. Edmund Burke, orang Irlandia yang resah dengan Revolusi Perancis, adalah salah satu diantara penentang teori hak-hak kodrati. Tetapi, penentang teori hak kodrati yang paling terkenal adalah Jeremy Bentham, seorang fisuf *utilitarian* dari Inggris. Kritik Bentham yang mendasar terhadap teori tersebut adalah bahwa teori hak-hak kodrati tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya.

2. Teori Positivisme (*Positivist Theory*)

Teori ini berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum yang rill, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (*rights, then should be created and granted by constitution, laws, and contracts*). Teori atau mazhab positivisme ini memperkuat serangan dan penolakan kalangan *utilitarian*, dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum

positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari “alam” ataupun “moral”

3. Teori Relativisme Budaya (*Cultural Relativist Theory*)

Teori ini merupakan salah satu bentuk anti-tesis dari teori hak-hak alami (*natural rights*). Teori ini berpandangan bahwa hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain, atau disebut dengan imperialisme kultural (*cultural imperialism*). Yang ditekankan dalam teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan (*different ways of being human*). Oleh karenanya, penganut teori ini mengatakan, *that rights belonging to all human beings at all times in all places would be the rights of desocialized and deculturized beings.*

4. Doktrin Marxis (*Marxist Doctrine and Human Rights*)

Doktrin marxis menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas adalah sumber seluruh hak (*repositiory of all rights*). Namun demikian, kecaman dan penolakan dari kalangan *utilitarian* dan *positivis* tersebut tidak membuat teori hak-hak kodrati dilupakan. Jauh dari anggapan Bentham, hak-hak kodrati tidak kehilangan pamornya, ia malah tampil kembali pada masa akhir Perang Dunia II. Gerakan untuk menghidupkan kembali teori hak kodrati inilah yang mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di panggung internasional. Pengalaman buruk dunia internasional dengan peristiwa Holocaust Nazi, membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan John Locke tentang hak-hak kodrati. Hal ini

dimungkinkan dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945, segera setelah berakhirnya perang yang mengorbankan banyak jiwa manusia itu.

Kemunculan teori hak-hak kodrati sebagai norma internasional yang berlaku di setiap negara membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya sebagai hak-hak kodrati. Substansi hak-hak yang terkandung di dalamnya juga telah jauh melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam hak kodrati (sebagaimana yang telah diajukan John Locke). Kandungan hak dalam hak asasi manusia sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan, belakangan ini substansinya bertambah dengan munculnya hak-hak “baru”, yang disebut “hak-hak solidaritas”. Dalam konteks keseluruhan inilah seharusnya makna hak asasi manusia dipahami dewasa ini.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian terhadap bagaimana peran Pemerintah Kota Salatiga dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Salatiga. Penelitian kualitatif dirasa pantas digunakan dalam penelitian ini dan kajian yang hendak dicapai oleh peneliti. Penelitian ini banyak mengkaji data penelitian yang tidak dapat dituangkan dalam bentuk angka-angka atau angka statistik melainkan tetap dalam bentuk kualitatif. Sehubungan dengan itu, Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ‘Kualitatif’.

Moleong, (2006, hlm 3) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki beberapa istilah seperti penelitian inkuiri naturalistik atau alamiah, etnografi, the Chicago School, fenomenologis, studi kasus, interpretative, ekologis, dan deskriptif. Namun yang paling umum digunakan yaitu penelitian kualitatif. Selanjutnya, Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi, dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Lebih lanjut, Moleong memaparkan bahwa penelitian kualitatif dapat dimanfaatkan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Pada awal penelitian subjek penelitian tidak didefinisikan dengan baik dan kurang dipahami;
2. Pada upaya pemahaman penelitian perilaku dan penelitian motivasional;
3. Untuk penelitian konsultatif;
4. Memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi seseorang;
5. Untuk memahami isu-isu yang sensitive;
6. Untuk keperluan evaluasi;
7. Untuk meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kuantitatif;

8. Digunakan untuk meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang subjek penelitian;
9. Digunakan untuk menemukan persepektif baru tentang hal-hal yang sudah banyak diketahui;
10. Digunakan oleh peneliti yang bermaksud meneliti sesuatu secara mendalam.
11. Dimanfaatkan oleh peneliti yang berminat untuk menelaah sesuatu latar belakang misalnya tentang motivasi, peranan, nilai, sikap, dan persepsi;
12. Digunakan oleh peneliti yang berkeinginan untuk menggunakan hal-hal yang belum banyak diketahui ilmu pengetahuan;
13. Dimanfaatkan oleh peneliti yang ingin meneliti sesuatu dari segi prosesnya. (2006, hlm 7).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti merasa bahwa penelitian kualitatif cocok untuk dijadikan sebagai metode penelitian mengenai permasalahan yang akan diteliti yaitu nilai-nilai social budaya. Metode penelitian kualitatif dapat memperoleh data lebih mendalam dan dapat memberikan data yang diperlukan oleh peneliti selama penelitian.

1.7.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup wilayah administrasi Kota Salatiga. Kota Salatiga dipilih karena memiliki kesamaan yang relative sama dengan kota-kota di Indonesia. Namun, mampu berkembang lebih pesat dengan menunjukkan toleransi antar umat beragama yang telah dilakukan. Di samping itu, juga mempertimbangkan alokasi dana dan kemudahan akses peneliti.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau partisipan penelitian merupakan sumber yang dapat memberikan informasi atau data di lapangan saat peneliti melakukan penelitian dan dipilih berdasarkan atas pertimbangan kebutuhan peneliti seperti yang dikemukakan oleh Sukmadinata (2010, hlm. 94) mengatakan “partisipan adalah orang-orang yang diajak wawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya”. Maka partisipan penelitian sangat diperlukan untuk memberikan informasi atau data dilapangan sehingga informasi yang diperoleh secara aktual dan konstektual. Selanjutnya Raco (2010) memaparkan lebih lanjut mengenai partisipan penelitian:

Pertama, partisipan adalah mereka yang tentunya memiliki informasi yang dibutuhkan. Kedua, mereka yang memiliki kemampuan untuk menceritakan pengalamannya atau memberikan informasi yang dibutuhkan. Ketiga, dengan benar-benar terlibat dengan sengaja, peristiwa, masalah itu, dalam arti mereka mengalaminya secara langsung. Keempat, bersedia untuk ikut serta diwawancarai. Kelima, mereka harus tidak berada dibawah tekanan, tetapi penuh kerelaan dan kesadaran akan keterlibatannya. Jadi, syarat utamanya yaitu kredibel dan kaya akan informasi yang dibutuhkan. (hlm. 190)

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan maka peneliti tidak melibatkan seluruh populasi yang ada untuk menjadi partisipan dalam penelitian dimana “teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel” (Sugiyono

(2014, hlm. 53). Maka atas dasar ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2014) mengatakan bahwa:

...*purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. (hlm. 53-54)

Maka teknik pengambilan sampel ini akan membutuhkan peneliti dalam menentukan informan yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian sehingga akan memperoleh data yang relevan atas rumusan masalah yang telah dibuat. Namun, peneliti belum memastikan berapa banyak jumlah partisipan yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan, tetapi secara singkat partisipan yang diperlukan peneliti ini yang berkaitan dengan pelaksanaan.

1.7.4 Jenis Data

Penelitian ini banyak mengkaji data penelitian yang tidak dapat dituangkan dalam bentuk angka-angka atau angka statistik melainkan tetap dalam bentuk kualitatif. Sehingga data yang didapatkan akan menjadi kaya dan lebih mendalam karena dituangkan dengan tulisan. Sehubungan dengan itu data yang dihasilkan melalui pendekatan kualitatif, maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 'Kualitatif' untuk menyempurnakan hasil penelitian ini.

1.7.5 Sumber Data

Sumber Data merupakan data atau fakta yang diperoleh melalui kata-kata dan tindakan. Sumber data sendiri terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder.

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung berkaitan dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber data primer yaitu observasi atau pengamatan dan melakukan wawancara yang narasumbernya yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Kota Salatiga.

Sedangkan dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber sekunder yaitu data-data dari Departemen Agama Kota Salatiga yang mendukung dan berkaitan dengan subjek penelitian ini.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2008, hlm. 224) mengungkapkan bahwa “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”. Teknik pengambilan data yang dilakukan peneliti tidak hanya menggunakan satu teknik, seperti yang diungkapkan oleh Creswell (2010, hlm. 267), “peneliti dalam kebanyakan penelitian kualitatif mengumpulkan beragam jenis data dan memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk mengumpulkan informasi di lokasi penelitian. Prosedur-prosedur penelitian kualitatif melibatkan empat jenis strategi”. Penelitian ini menginginkan adanya gambaran mengenai eksistensi peran Pemerintah Kota Salatiga dalam menjaga kerukunan Bergama di

Kota Salatiga itu sendiri yang memberi pengaruh terhadap kota Salatiga yang menjadikan Kota Salatiga sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia melalui indeks kota toleran yang dikeluarkan Setara Institute, sehingga tidak hanya dapat diperoleh dari pengamatan tetapi harus menggunakan cara lain agar dapat memperoleh informasi yang diperlukan. Perolehan informasi dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi literatur.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengamati, mendengarkan, merasakan, mengikuti segala hal yang terjadi dengan cara mencatat atau merekam suatu kejadian yang sedang berlangsung, s. Bungin (2007) mengatakan bahwa:

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. (hlm. 115)

Peneliti menggunakan observasi memiliki alasan tersendiri, yaitu untuk mengamati aktivitas partisipan seperti halnya dalam melaksanakan kegiatan yang dapat memperkuat kerukunan umat beragama yang ada di kota Salatiga yang dilaksanakan dan di inisiasi oleh Pemerintah Kota Salatiga sehingga dapat diungkap nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tersebut.

b. Wawancara Mendalam

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari setiap partisipan sehingga informasi atau data yang dicari dapat ditemukan dari sumbernya langsung. Wawancara berarti pertemuan dua orang atau lebih untuk saling menukar informasi melalui tanya jawab sehingga data atau informasi yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan diperoleh secara langsung dari sumber partisipannya serta dapat mengetahui apa yang terkandung dalam pemikiran partisipan penelitian secara mendalam mengenai masalah Peran Pemerintah Kota Salatiga Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama Hal ini sesuai dengan Bungin (2007) mengatakan bahwa:

wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. (hlm. 108)

Melalui wawancara juga diharapkan memberikan gambaran mengenai bagaimana Peran Pemerintah Kota Salatiga Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Kota Salatiga yang sebelumnya dengan menggunakan observasi belum didapatkan secara mendalam, sesuai dengan Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2010, hlm. 316) mengungkapkan bahwa “*interviewing provide the reserarcher a means to gain a deeper understanding of how the participant*

interpret a situation or phenomenon than can be gained through observation alone.”

Pada teknik ini wawancara tidak hanya dilakukan satu kali melainkan dilakukan secara berulang-ulang agar memperoleh keabsahan data. Proses wawancara pertama dilakukan dengan *interview guide* atau pedoman wawancara yang telah dibuat berkaitan dengan apa yang akan di kaji dalam penelitian. Selanjutnya, peneliti tetap menggunakan pedoman wawancara tetapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada partisipan mungkin tidak seperti yang tercantum dalam pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti, akan tetapi pertanyaan yang tidak tercantum dalam pedoman wawancara masih dalam ranah yang sama. Hal ini dilakukan peneliti agar memperdalam data penelitian.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara lain peneliti dalam mengumpulkan data dari lapangan dan menambah data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran nyata dari data pada saat peneliti berada di lapangan. Misalnya, peneliti mengikuti acara atau pun pertemuan yang diadakan Pemerintah Kota Salatiga yang mempertemukan para tokoh-tokoh agama untuk pembahsan mengenai agar tetap terjalin nya kerukunan umat beragama di Kota Salatiga, maka akan lebih efektif apabila ada dokumentasi berupa foto dan video sebagai penguat data agar lebih akurat. Selain itu, dokumentasi ketika peneliti melakukan wawancara dengan partisipan penelitian akan lebih meyakinkan terdapat adanya foto atau video yang mendukung data yang diperoleh. Selain itu, penggunaan

studi dokumentasi adalah sebagai upaya yang menunjang data-data yang didapatkan ketika melakukan observasi dan wawancara, data-data yang diperoleh dapat berupa indeks, peta, jumlah penduduk, prestasi, foto dan lain sebagainya serta didapatkan bukan hasil dari perkiraan tetapi data yang sudah tersedia. Hal ini sejalan menurut Basrowi & Suwandi (2008) bahwa dokumentasi:

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. (hlm. 158)

Alat yang dibutuhkan dalam teknik dokumentasi yaitu kamera *handphone* atau kamera. Dengan adanya dokumentasi data yang diperoleh menjadi pelengkap dan pendukung bagi data primer yang sebelumnya diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.

d. Studi Literatur

Pada umumnya studi literatur adalah mempelajari buku-buku, artikel, jurnal, majalah, atau skripsi yang berhubungan dengan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian. Buku-buku, artikel, jurnal, majalah atau skripsi yang dipelajari harus ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Sehubungan hal tersebut peneliti berusaha mencari data berupa teori, pengertian, dan uraian-uraian yang dikemukakan oleh para ahli atau penulis untuk dijadikan landasan

teoritis khususnya materi-materi yang sejalan dengan masalah yang hendak dikaji oleh peneliti.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data menurut Patton (dalam Basrowi & Suwandi, 2008, hlm. 91) adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian besar. Selanjutnya Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2008, hlm. 246) mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interatif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.” Analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah analisis data sebagai berikut.

a. Data reduction (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses analisis yang dilakukan untuk menggolongkan data-data yang dianggap penting oleh peneliti sebab data yang didapat di lapangan masih bersifat kasar dan perlu di analisis dengan maksud agar data-data yang diperoleh sejalan dengan masalah yang akan disajikan oleh peneliti. Basrowi & Suwandi (2008, hlm. 209) mengatakan bahwa “reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan”. Selain itu, data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak maka perlu dianalisis agar mengurangi data-data yang tidak diperlukan oleh peneliti. Sugiyono (2008) menjelaskan:

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. (hlm. 247)

Setelah data terkumpul yang diperoleh peneliti dilapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian maka peneliti melakukan reduksi data dengan merangkum, menggolongkan, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya agar memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya, apabila data yang sudah dianalisis sudah dirangkum dan data masih kurang akurat maka peneliti mencarinya dengan kembali ke lapangan.

b. Data Display (Penyajian Data)

Sugiyono (2008, hlm. 249) mengatakan bahwa “dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya”. Penyajian data dilakukan setelah peneliti mereduksi data yang diperoleh dari pengumpulan data dilapangan. Peneliti *mendisplay* data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,

merencanakan kerja selanjutnya yang berdasarkan apa yang telah dipahaminya tersebut. Penyajian data yang dilakukan peneliti lebih banyak dituangkan dalam bentuk uraian singkat atau narasi, maka peneliti melakukan penyajian data yang dilakukan setelah data direduksi agar mudah memahami apa yang terjadi dalam penelitian dan memudahkan rencana selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

c. Conclusion drawing/verification

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah *Conclusion drawing/verification* atau kesimpulan dan verifikasi. Sugiyono (2008) mengatakan;

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. (hlm. 252).

Tujuan dari kesimpulan dan verifikasi adalah menemukan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan itu dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, gelap atau remang-remang sehingga ketika dilakukan penelitian akan lebih jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Langkah yang ketiga yang dilakukan peneliti dilapangan bermaksud untuk mencari makna berdasarkan informasi-informasi yang telah diperoleh atau dikumpulkan, agar mencapai suatu kesimpulan yang baik, kesimpulan tersebut senantiasa sudah diverifikasi kepada informan selama penelitian berlangsung.

1.7.8 Kualitas Data

Penelitian yang mengukur data yang diperoleh. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Untuk mengetahui valid dan reliable suatu data harus melui suatu pengujian, yaitu uji kredibilitas data penelitian. Uji kredibilitas disebut juga sebagai uji kepercayaan pada suatu data hasil dari hasil penelitian. Uji kredibilitas ini dilakukan untuk melihat vaid tidaknya data yang diperoleh di lapangan. Uji kredibilatas dapat dilakukan dengan berbagai cara.

1) Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan dapat meningkatkan kredibilitas data. Karena meningkatkan ketekunan dapat memeiksa ulang apakah data yang didapatkan benar atau tidak. Seperti pendapat Sugiyono (2008, hlm 272) mengatakan bahwa “meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data tersebt salah atau tidak”.

2) Triangulasi

“Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sesuai dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik.” (Sugiyono, 2014, hlm.125).

Uji keabsahan data dapat dilakukan dengan triangulasi. Sugiyono (2008) menjelaskan triangulasi ialah:

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. (hlm. 241)

Triangulasi ini merupakan teknik gabungan dari ketiga sebelumnya, yakni observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Triangulasi merupakan teknik paling terakhir yang digunakan peneliti dalam menggali data di lapangan.

Peneliti menggunakan triangulasi karena untuk melakukan pengecekan data yang didapat di lapangan dari berbagai sumber, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

a. Triangulasi Sumber Data

Untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan untuk mengecek data yang diperoleh dari lapangan melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan informasi yang didapatkan melalui seorang narasumber. Triangulasi yang dipakai pada penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber.

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Berbagai padangan tersebut akan

melahirkan sebuah keluasaan pengetahuan. Menurut Patton (2015:332) triangulasi sumber data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakannya secara pribadi,
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,
4. Membandingkan leadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, pemerintah dan kelompok yang ikut berperan,
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.